

PERAN POLITIK KIAI DALAM PENDIDIKAN PESANTREN

Syamsul Rijal

STAI Miftahul Ulum Panyepen Pamekasan

Email: rijal-rij22@yahoo.co.id

Abstrak: Dalam pesantren, kiai merupakan tokoh sentral yang berperan sebagai *decision maker* dan diyakini mempunyai karismatik yang merupakan perwujudan doktrin *ulamâ' waratsah al-anbiyâ'*. Pengakuan demikian memberi legitimasi bahwa kiai dipandang sebagai sosok yang paling menentukan dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi umat. Namun, demikian, kiai acap dimanfaatkan oleh para politisi sebagai *vote getter* dalam mendulang suara. Tulisan ini akan mengkaji peran politik kiai dalam dinamika pendidikan pesantren. Dinyatakan bahwa banyak pesantren yang mengalami degradasi kualitas karena kiainya terlalu sibuk dalam berpolitik, dan pada akhirnya akan ditinggal oleh santrinya.

Kata kunci: politik, kiai, pesantren

Abstract: In boarding school, Kiai is a central figure who acts as the decision maker and is believed to be charismatic embodied the doctrine of *ulamâ' waratsah al-anbiyâ'*. This recognition legitimating the scholars as the most crucial figure in dealing with various problems faced by the people. However, the scholars often make use by politicians as a vote getter for election. This paper describes the political role of kiai in pesantren education. Many pesantren have decreased the quality of the education due to the kiai's involvement in politics that the students are ignored at the end.

Keywords: politics, kiai, pesantren

Pendahuluan

Dalam pesantren, kiai merupakan tokoh sentral yang mempunyai peranan sebagai *decision maker* (pembuat keputusan) dalam segala hal. Kiai diyakini mempunyai eksistensi karismatik yang merupakan perwujudan dari doktrin *al-'ulamâ' waratsah al-anbiyâ'* (ulama adalah pewaris para nabi). Pengakuan masyarakat bahwa kiai pewaris para nabi memberikan legitimasi bahwa kiai adalah sosok yang paling menentukan dalam mengatasi berbagai macam persoalan yang dihadapi umat, baik berupa masalah pribadi, sosial ekonomi, maupun persoalan yang berkaitan dengan politik. Dengan demikian, keanekaragaman persoalan yang selalu memerlukan solusi dari kiai, khususnya masalah-masalah politik, kekuasaan dan kenegaraan menjadikan kiai dan pesantren tidak hanya berperan dalam memberikan wejangan keagamaan, tapi juga terlibat dalam persoalan politik.

Keterlibatan kiai dalam partai-partai politik dengan sendirinya menjadikan mereka harus berkiprah guna memenangkan partainya. Di satu sisi hal ini akan membawa dampak positif karena dapat ikut serta memberikan pendapat dalam proses pengambilan kebijakan umum. Namun di sisi yang lain, hal ini disinyalir juga memiliki dampak negatif karena mereka berperan untuk mempengaruhi umat memilih partainya. Hal ini tercermin dalam isu-isu sosial dan politik terutama dalam kasus pemilu.¹

Keterlibatan kiai dalam politik selama ini kerap menimbulkan kontroversi. Di satu sisi, keterlibatan kiai dalam politik dimaknai sebagai sebuah dinamika politik pesantren yang mempunyai efek positif, karena akan mendorong terciptanya masyarakat yang partisipatif dan kritis, menggerakkan modal sosial publik untuk bersama membangun kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang lebih baik dan mandiri, serta memberikan kebebasan terhadap setiap individu untuk mengekspresikan pemikiran dan tindakannya tanpa adanya kungkungan monopoli kebenaran mutlak. Hal ini disebabkan oleh setiap orang dimungkinkan memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda.

¹ Nanang Tahqiq, *Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 199.

Namun di sisi yang lain, keterlibatan kiai dalam politik dianggap tidak produktif dan berefek negatif karena seringkali membingungkan dan meresahkan masyarakat, bahkan tidak jarang menjadi pangkal perpecahan dan konflik sosial dalam skala massif. Perbedaan dan perubahan sikap pandang pesantren juga akan memunculkan friksi antar pendukung ideologi/aliran yang berbeda. Dukungan tersebut tidak terlepas dari politisasi agama (penggunaan simbol-simbol agama). Mobilisasi inilah yang memunculkan pergumulan politik antar pesantren yang pada akhirnya terjadi polarisasi di tengah masyarakat.²

Politik dalam Islam

Dalam kamus-kamus bahasa arab modern, kata politik biasanya diterjemahkan dengan kata *siyâsah*. Kata ini terambil dari akar kata *sasa-yasusu* yang diartikan mengemudi, mengendalikan, mengatur, dan sebagainya. Dari akar kata yang sama ditemukan kata *sus* yang berarti penuh kuman, kutu, atau rusak. Secara terminologi, sebagaimana diungkap Abdul Wahab Hallaf,³ politik diartikan sebagai Undang-undang yang mengatur dan memelihara ketertiban untuk kemaslahatan bersama. Selanjutnya kata *siyâsah* ini dapat diartikan dengan suatu ilmu yang berkaitan dengannya, untuk kemaslahatan bersama atas dasar keadilan dan *'istiqâmah*.⁴

Dewasa ini, definisi mengenai politik yang sangat normatif telah terdesak oleh definisi-definisi lain yang lebih menekankan pada upaya (*means*) untuk mencapai masyarakat yang lebih baik, seperti kekuasaan, pembuatan keputusan, kebijakan, alokasi nilai, dan sebagainya. Namun demikian, pengertian politik, sebagai usaha untuk mencapai masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Atau yang disebut David E. Apter,⁵ "*a noble quest for a good order and justice*" (usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan)

²Kamaruddin, *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi, Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu 2004* (Jakarta: Visi Publishing, 2002), hlm. 51.

³Abdul Wahab Hallaf, *al-Siyâsah al-Syarî'ah* (Kairo: Daral Ansar, 1997), hlm. 4.

⁴Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyâsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 23.

⁵David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 5.

dalam suatu Negara untuk kemaslahatan rakyat atas prinsip keadilan bersama.

Dalam pemikiran politik Islam terdapat paling tidak tiga aliran atau corak pemikiran politik yang muncul di dunia Islam, yaitu: *Pertama*, aliran yang berpendirian bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan serba lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk kehidupan bernegara. Lebih jauh aliran ini berpendapat bahwa umat Islam hendaknya kembali kepada sistem politik (ketatanegaraan) Islam dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem politik barat. Aliran ini disebut revivalisme, yaitu suatu paham politik yang menginginkan kebangkitan Islam lewat partai-politik Islam yang diteladani oleh nabi Muhammad dan Khulafaur Rosyidin.

Kedua, aliran yang berpendirian bahwa al-Qur'an tidak mengatur masalah politik dan negara. Lebih jauh pendukung aliran ini berpendapat bahwa nabi Muhammad hanyalah seorang rasul biasa dengan tugas tunggal, yakni mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia menjunjung tinggi budi pekerti luhur dan Muhammad tidak pernah dimaksudkan untuk politik. Aliran ini disebut sekularisme, yakni suatu paham yang memisahkan agama dari negara atau politik, aliran ini menolak pendasaran politik pada Islam, atau paling tidak menolak determinasi bentuk negara politik pada Islam.

Ketiga, aliran yang berpendapat bahwa al-Qur'an tidak terdapat sistem politik, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan berpolitik. Sesungguhnya dalam Islam tidak terdapat kekuasaan keagamaan selain kewenangan untuk memberikan peringatan secara baik, mengajak orang lain ke arah kebaikan dan menariknya dari keburukan. Kewenangan ini diberikan kepada setiap muslimin, baik berpangkat tinggi maupun rakyat biasa.

Dalam tulisan tentang usaha pencarian konsep negara dalam sejarah pemikiran politik Islam, Dien Syamsuddin mengemukakan perdebatan tentang hubungan agama dan negara (politik) yang telah memunculkan tiga paradigma pemikiran dalam politik Islam. *Pertama*, paradigma integralistik yang mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama dan negara tidak dapat dipisahkan (*scheiding van kerk en staat*) karena apa yang menjadi wilayah agama otomatis merupakan wilayah politik atau negara.

Kedua, paradigma sekularistik yang mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, pandangan sekularistik menolak pendasaran negara kepada Islam atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu negara. *Ketiga*, paradigma yang mengajukan pandangan bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu berhubungan timbal-balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara membutuhkan agama karena dengan agama, negara dapat melangkah dalam bimbingan etika dan moral.⁶

Jika dikaitkan dengan sistem politik di Indonesia, dapat dinyatakan bahwa Indonesia menganut aliran ketiga tersebut. Sebagaimana direfleksikan dari Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, hingga kehadiran Kementerian (dulu Departemen) Agama sebagai institusi yang mengurus agama. Dalam negara yang menganut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara (politik) merupakan sebuah hubungan yang saling mempengaruhi, saling mengisi, bahkan saling mengkooptasi.⁷ Karena itu, dilihat dari sisi ini, perpolitikan di Indonesia membuka ruang partisipasi bagi kelompok keagamaan, termasuk komunitas pesantren, untuk terlibat dalam politik.

Motivasi dan Orientasi Politik Kiai

Menurut Ahmad Patoni, orientasi para kiai terjun ke dunia politik adalah untuk menegakkan *amr bi al-ma'rûf wa nahy 'an al-munkar*. Konsep ini diletakkan dalam pengertian yang luas, yaitu pengawasan dan evaluasi. Dalam pandangan kiai, konsep ini memiliki peran signifikan, karena dalam kenyataannya tatanan sosial-politik yang ada banyak yang tidak sejalan dengan ajaran agama. Karena itulah para kiai merasa perlu untuk terjun ke dalam dunia politik untuk

⁶Dien Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Islam", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an* No. 2, Vol. IV, 1993.

⁷Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara* (Jakarta: Paramadina, 1996).

mewujudkan kontrol kekuasaan yang sewenang-wenang dan menyimpang dari aturan moral, hukum, maupun aturan agama.⁸

Kepentingan orientasi politik kiai adalah kepentingan memperjuangkan umat, sedangkan kepentingan individu dan kelompok tidak dinyatakan secara eksplisit. Realitas sosial berdimensi historis, kultural dan interaksionis.

Sedangkan kekuasaan, secara teoritis adalah naluri manusia dalam perilaku politik yang tidak bisa diabaikan.⁹ Retorika politik kiai dalam menggunakan simbol-simbol agama perlu dibuktikan secara nyata dalam kerja-kerja politik yang lebih riil. Kiai juga lebih bisa berperan mencerdaskan umat melalui komunikasi politik dan bahasa politik. Ketika misi kiai berpolitik adalah *amr bi al-ma'rûf wa nahy 'an al-munkar*, maka kerja kiai lebih fokus pada strategi menyelesaikan kemungkaran yang bisa dirasakan bagi umat. Sebab apabila bahasa simbol agama yang lebih dikedepankan tanpa kerja-kerja politik yang lebih riil, akan menciptakan suatu fanatisme berlebihan terhadap diri kiai oleh umat.

Keterlibatan kiai dalam politik, tidak bisa dilihat hanya sebagai sikap sesaat. Pilihan sikap tersebut memiliki keterkaitan dengan dinamika sosial politik yang sedang berkembang, dan juga berkaitan dengan seluk beluk politik pada masa sebelumnya.¹⁰ Pada era orde baru, kecenderungan arus politik yang sentralistik menjadikan kiai menghadapi dilema, khususnya saat berhadapan dengan pemerintah.¹¹ Segala aktivitas politik masyarakat, termasuk aktivitas politik yang dilakukan kiai, dibatasi atau bahkan dicurigai. Untuk memudahkan kontrol terhadap aktivitas kalangan kiai, pemerintah membentuk majelis ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah koordinasi gerakan ulama.¹²

⁸Ahmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 158. Lihat juga Hiroko Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 160.

⁹Carless F. Andrain, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hlm. 135.

¹⁰Patoni, *Peran Kiai Pesantren*, hlm. 158.

¹¹Ibid., hlm. 159.

¹²Ibid., hlm. 172.

Di samping itu, ada juga yang mengatakan bahwa tujuan atau orientasi politik ulama pada hakikatnya adalah dakwah atau penyebaran ajaran atau nilai-nilai agama. Sehingga politik tidak hanya berorientasi pada kekuasaan belaka tapi juga bernilai agamis. Ini sekaligus sebagai bukti bahwa agama adalah rahmat bagi semua alam, atau disebut sebagai agama universal.

Ahmad Patoni juga mencatat beberapa faktor yang melatari kiai pesantren terjun dalam dunia politik. *Pertama*, alasan teologis yang menyatakan tidak adanya pemisahan antara agama (*dîn*) dan politik (*siyâsah*). *Kedua*, alasan dakwah, yakni sebagai sarana untuk mensosialisasikan nilai-nilai keislaman kepada masyarakat. *Ketiga*, faktor jejaring politik yang sulit dihindari sehingga menjadikan kiai pesantren harus terjun ke dalamnya.¹³

Dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan, khususnya dalam pandangan kiai politis, hubungan antara agama dan politik jelas memiliki suatu keterkaitan, namun tetap harus dibedakan. Satu pihak, masyarakat agama memiliki kepentingan mendasar agar agama tidak dikotori oleh kepentingan politik, karena bila agama berada dalam dominasi politik, maka agama akan sangat mudah diselewengkan. Akibatnya, agama tidak lagi menjadi kekuatan pembebas atas berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan, sebaliknya agama akan berkembang menjadi kekuatan yang menindas dan kejam.

Di pihak lain, adalah kewajiban moral agama untuk ikut mengarahkan politik agar tidak berkembang menurut selernya sendiri yang bisa membahayakan kehidupan. Agar agama dapat menjalankan peran moral tersebut, maka agama harus dapat mengatasi politik, bukan terlibat langsung ke dalam politik praktis. Karena bila agama berada di dalam kooptasi politik, maka agama akan kehilangan kekuatan moralnya yang mampu mengarahkan politik agar tidak berkembang menjadi kekuatan yang menekan kehidupan dan menyimpang dari batas-batas moral dan etika agama, masyarakat, dan hukum.¹⁴

¹³Ibid., hlm. 153-156.

¹⁴Rolan Syafii, *Agama dan Politik* (Bandung: Pustaka Politika, 2003), hlm. 88.

Menurut BJ. Bolland, ketertarikan umat Islam kepada partai politik bukan saja disebabkan oleh kemampuan partai politik memperjuangkan dan membela kepentingan Islam, tetapi lebih karena adanya tipologi umat Islam dalam memandang hubungan politik dengan Islam. Terdapat tiga tipologi dalam berpolitik ketika dihadapkan dengan Islam, yaitu tipologi ideologis, tipologi kharismatik, dan tipologi rasional. Dalam tipologi ideologis, umat Islam memosisikan berpolitik sama dengan beragama Islam, sehingga semangat pembelaan politik sama dengan semangat membela dan memiliki Islam. Memilih sebuah partai politik sama dengan memilih agama Islam, dan seterusnya ketaatan dalam politik sama dengan ketaatan menjalankan ajaran Islam. Sedangkan tipologi kharismatis mengasumsikan bahwa umat Islam memilih sebuah partai politik mengikuti sikap dan perilaku seseorang yang dikagumi di sekitarnya.

Apa yang dikatakan dan dilakukan figur selalu menjadi rujukan masyarakat. Akibat kekaguman yang berlebihan, umat Islam sering tidak mampu bersikap dan berpikir rasional. Dalam tipologi rasional, kemampuan umat Islam dalam memilih partai politik (atau disebut sikap politik) benar-benar didasarkan pada pandangan rasional. Memilih atau tidak memilih partai politik tertentu dilihat dari kemampuan partai politik menawarkan program yang dapat memperbaiki atau memperjuangkan nasib rakyat.¹⁵

Saat ini, mayoritas umat Islam masih menempati posisi tipologi pertama dan kedua ketimbang tipologi ketiga. Karena itu, ketika umat Islam memandang bahwa berpolitik sama dengan beragama Islam, karakter itu akan mendorong munculnya tokoh-tokoh agama sebagai tokoh politik. Persoalan umat yang bersinggungan dengan kepentingan politik tidak lagi ditangani oleh politisi profesional, tetapi diambil alih oleh kiai dan tokoh-tokoh pesantren yang merasa memiliki pengaruh dan otoritas keagamaan lebih besar atas umat yang dipimpinnya. Dengan demikian keterlibatan pesantren dalam politik sesungguhnya membuktikan pandangan di atas. Setiap pesantren dan kiai memiliki cara sendiri-sendiri sesuai sejarah pesantren, spektrum pengaruh pesantren di tengah masyarakat,

¹⁵BJ. Bolland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1982).

potensi peluang politik yang dimiliki, serta seberapa besar tarikan politik eksternal yang mereka alami.

Peran Kiai dalam Konstelasi Politik di Indonesia

Sejak masa-masa awal kerajaan Islam, banyak ulama memainkan peran penting dalam pemerintahan. Menurut Benda, para penguasa yang baru dinobatkan harus banyak bersandar kepada para ulama, guru mistik, dan ahli kitab karena merekalah yang dapat menobatkan para penguasa tersebut menjadi pangeran-pangeran Islam, mengajar serta memimpin upacara keagamaan, serta menjalankan hukum Islam terutama di bidang perkawinan, perceraian, dan warisan.

Kehadiran ulama di pusat pemerintahan, misalnya, sangat diperlukan untuk memberikan identitas keislaman seperti, memimpin upacara keagamaan, mengajar dan menyelenggarakan peradilan agama. Namun demikian, pada waktu yang bersamaan, hubungan mereka juga sulit dengan kaum ningrat. Di samping itu, mereka sering dipandang sebagai ancaman bagi kekuasaan yang ada. Itu sebabnya kekuasaan mereka dikurangi, mereka diasingkan bahkan (jika dipandang perlu) dihancurkan dengan kekerasan bila dinilai menjadi terlalu kuat serta mengancam kekuasaan raja.

Bagi para kiai situasi yang demikian telah menempatkan penguasa pemerintahan bukan hanya sebagai sumber kuasa dan kewibawaan, namun juga sumber malapetaka. Menurut Benda, seperti dikutip Pradjarta Dirdjosanjoto menyatakan hal ini membenarkan bahwa proses Islamisasi¹⁶ Jawa untuk waktu yang lama mempunyai arti yang bersifat politis dari pada keagamaan.¹⁷

¹⁶Menurut Naquib al-Attas, proses Islamisasi di Pulau Jawa meliputi tiga tahapan penting, yaitu: *pertama*, sekitar tahun 1200-1400 Masehi, di mana yurisprudensi atau *fiqh* memainkan peranan besar dalam menafsirkan dan menarik kalangan pribumi untuk masuk ke Islam. Pemeluk Islam pada tahap ini tidak mesti diikuti oleh implikasi-implikasi rasional dan intelektual dari agama baru Islam. Konsep-konsep fundamental tentang keesaan Allah masih kabur dalam pikiran masyarakat pribumi yang bertumpang tindih dengan konsep lama. *Kedua*, periode sekitar 1400-1700 M, pada tahap ini peranan besar dalam menafsirkan hukum agama berjalan terus ke arah mistisme dan metafisika filosofis yang bersifat spiritual dan unsur rasional intelektual seperti teologi rasional (*al-'ilm al-kalâm*). Dan *ketiga*, periode sekitar 1700 M ke atas. Al-Attas mengakui bahwa pada tahap ketiga ini pengaruh budaya Barat cukup dominan. Namun dasar-dasar aqidah keislaman semacam semangat rasionalitas dan

Peran kiai di bidang keagamaan tidak dapat dipisahkan dari peran mereka di bidang politik. Berpusat pada peranannya sebagai guru dan ahli agama, para kiai seringkali memainkan peran penting dalam berbagai bidang sosial, kemasyarakatan dan politik. Pandangan bahwa Islam tidak dapat memisahkan antara agama dan negara ikut mendorong gejala ini. Di lain pihak, sistem sosial di sekitarnya juga ikut mendukung hal itu.¹⁸

Islam sejak zaman penjajahan memang sudah terlibat dalam aktifitas yang bersifat politis. Gerakan dan peperangan yang dipelopori oleh Imam Bonjol dalam perang Paderi, pangeran Diponegoro, perang Aceh dan lain sebagainya, dapat dijadikan indikator pernyataan di atas. Oleh karena itulah, kebijakan Belanda terhadap umat muslim selalu membatasi kegiatan-kegiatan mereka, terutama di bidang politik. Namun, gerakan-gerakan tersebut bersifat lokal. Hal itu dapat dimaklumi, karena masyarakat Indonesia pada waktu itu secara politis masih terbelah menjadi beberapa kerajaan, di samping itu nasionalisme memang belum memasyarakat di Indonesia.

Pada zaman pra-kemerdekaan, kiai meneriakkan kemerdekaan melalui pesantren (pendidikan), lobi kultural dan perang melawan penjajahan, sedangkan pasca-kemerdekaan mereka terjun ke dunia politik melalui partai politik. Hal ini dapat dilihat pada pemilu pertama tahun 1955 sampai pemilu terakhir tahun 2004 yang lalu. Panggung politik nasional selalu diramaikan dengan para kiai yang *wira-wiri* masuk dalam partai politik. Hal ini tentunya semakin menambah meriah pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia. Hal ini dikarenakan, kiai memiliki pengikut yang setia seperti *fans* dalam dunia infotainment. Lebih lanjut, kharisma kiai selalu dapat menarik simpati konstituen, karena mereka dianggap orang suci dan doanya selalu makbul (diterima) oleh Tuhan.

Menurut Bambang Purwoko, setidaknya ada tiga periode pentas politik elit agama (kiai) dalam percaturan perpolitikan nasional.

interrasionalitasnya telah menancap kuat. Naquib al-Attas, *Islam dan Sekularisme* (Bandung: Pustaka Salman, 1981), hlm. 252.

¹⁷Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat Kiai Pesantren-Kiai Langgar* (Jakarta: LKiS, 1994), hlm. 35.

¹⁸ Ibid., hlm. 187.

Pertama, adalah periode 1945 sampai dengan periode tahun 1965,¹⁹ ketika para politisi dengan basis agama masih bisa berkiprah secara relatif bebas dalam perpolitikan nasional. Dalam periode ini para elit agama (kiai) yang menjadi politisi selanjutnya disebut sebagai politisi Islam, bisa menjadi pelaku aktif atau subyek dari permainan politik Indonesia.

Kedua, adalah masa-masa dimana politisi Islam lebih berperan sebagai obyek yang dibelenggu oleh sistem maupun rezim pemerintahan otoriter Orde Baru²⁰ yang menganggap kekuatan Islam sebagai musuh besar negara dan karena itu para elitnya harus dikooptasi sedemikian rupa sehingga bisa meminimalisir semua potensi perlawanan dan pembangkangan terhadap dominasi negara. Periode kedua ini berlangsung cukup lama, biasanya dikenal dengan 32 tahun masa kejayaan Orde Baru antara tahun 1966 sampai dengan 1998.

Ketiga, adalah periode antara tahun 1998-2006 yang ditandai dengan kembalinya kebebasan untuk mengekspresikan hak-hak politik warga negara termasuk ekspresi politik para elit Islam. Dalam kurun waktu yang cukup pendek sejak tahun 1998 kita telah menyaksikan sedemikian banyak peristiwa politik yang melibatkan para politisi Islam dari berbagai jenis massa. Selama periode ketiga ini pula kita menyaksikan perilaku dan wajah politik yang ternyata tidak tunggal, ada yang bopeng tetapi banyak juga yang mulus.²¹

¹⁹Pada tahun 1945-1959, setelah proklamasi kemerdekaan, para ulama juga berperan aktif dalam politik berkenaan dengan maklumat No.X tertanggal 5 November 1945 tentang dibenarkannya pembentukan partai-partai politik sebagai sarana pelaksanaan demokrasi didalam negara Republik Indonesia, maka pada tanggal 7-8 November 1945, diadakan kongres umat Islam Indonesia di Yogyakarta yang dihadiri oleh para ulama, tokoh-tokoh politik, organisasi-organisasi sosial. Lihat Abdul Qadir Jailani, *Peran Ulama dan Santri dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), hlm. 135.

²⁰Pada masa orde baru (Orba), peran kiai sebagai pengontrol pemerintah, seperti K.H. Dalari Umar, K.H. Abdullah Syafe'i, K.H. Noer Ali berhasil mengerahkan masa pemuda Islam untuk melakukan demonstrasi ke DPR yang sedang membahas rancangan undang-undang perkawinan yang sebagian pasalnya bertentangan dengan hukum perkawinan Islam. Lihat Ibid.

²¹Bambang Purwoko, "Perilaku Politik Elit Agama dalam Dinamika Politik Lokal", dalam *Focus Groups Discussion*, "Perilaku Elit Politik dan Elit Agama dalam Pilkada di

Tidak bisa dinafikan bahwa kiai juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik. Era reformasi yang telah membuka kembali kebebasan masyarakat untuk turut serta dalam berbagai bidang adalah bentuk nyata terbukanya “gerbang” politik bagi kiai. Hal itu didasarkan juga pada peran politik kiai yang sejak dahulu memiliki pengaruh yang cukup besar.

Abdul Qadir menjelaskan bahwa secara umum setidaknya ada dua peran yang dilakukan oleh kiai dalam konstelasi politik. *Pertama*, peran formal, dalam hal ini kiai adalah sosok politisi yang telah masuk pada sistem politik. Dengan begitu, kiai dalam hal ini juga turut serta dalam melaksanakan rencana dan kegiatan partai, misalnya menjadi dewan perwakilan rakyat, kampanye, rapat kerja dan semacamnya.

Kedua, peran nonformal, dalam hal ini kiai lebih berstatus sebagai kiai namun kemudian juga mereka mencoba mendekati politik itu sendiri. Kiai semacam ini, secara struktural tidak bisa dikatakan sebagai politisi namun secara sosial mereka memiliki peran serta dalam lingkaran politik yang berkembang. Kiai semacam ini yang kemudian sering kali dijadikan kambing hitam oleh para politisi untuk kepentingan politik mereka.²²

Di masa sekarang, kiai banyak menjadi aktor politik, dalam artian mayoritas yang memimpin. Hal itu menjadi benar ketika melihat bahwa “perselingkuhan” kiai dengan politik dewasa ini semakin dekat. Banyaknya kiai yang menjadi anggota partai dan kemudian menduduki peranan-peranan penting di daerah juga akan menjadi sebab dominan perpolitikan kiai ke depan.

Keterlibatan kiai dalam politik praktis salah satunya adalah karena komunikasi politik kiai dirasa sangat efektif ketika berhadapan dengan lingkungan masyarakat Islam tradisional. Keefektifan komunikasi yang dilakukan oleh kiai dalam menyampaikan gagasan politiknya tidak dapat dilepaskan dari peran kiai sebagai seorang yang memiliki otoritas dalam kehidupan masyarakat. Weber menjelaskan perihal kewenangan (otoritas) pemimpin, mengajukan

Kabupaten Kulonprogo”, diselenggarakan oleh LABDA Shalahuddin, JPPR, dan The Asia Foundation, Yogyakarta, 3 Agustus 2006.

²²Jailani, *Peran Ulama dan Santri*, hlm. 127.

tipologi kewenangan sebagai *legal (rational) authority, traditional authority, dan charismatic authority*.²³

Perkembangan politik praktis di Indonesia membawa sejumlah kiai terjun langsung maupun tidak langsung dalam kancah perpolitikan di Tanah Air. Aspirasi politik kiai dimanfaatkan partai politik di tingkat nasional maupun lokal dalam setiap Pemilu. Dengan demikian, kiai dihadapkan pada dunia politik praktis yang sarat dengan ketidakpastian dan kepentingan.

Dinamika politik itu terasa meningkat, baik yang menyangkut masalah isu-isu yang ditampilkan dalam masa kampanye pemilu maupun pasca pelaksanaan pemilu. Kesadaran politik masyarakat dapat diukur dari perilaku politik santri dalam mengekspresikan dukungannya terhadap partai-partai kontestan pemilu. Tumbuhnya tingkat kesadaran santri itu tergantung pula dari sejauhmana orientasi politik kiai dapat mempengaruhi perilaku politik santri.²⁴

Perpolitikan kiai dalam sejarahnya tercatat cukup strategis dan berani, kiai ternyata telah berhasil memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam berbagai persoalan politik. Di Indonesia, pemikiran politik yang berkembang dapat dibedakan dalam pemikiran yang berlatar belakang paham ideologi modern, seperti demokrasi sosial, sosialisme, nasionalisme, komunisme, dan pemikiran politik yang berlatar belakang tradisionalisme Islam.²⁵

²³Stephen W Littlejohn, *Theories of Human Communication, Belmont* (California: Wadsworth Publishing Company, 1992), hlm. 226-227. Kepemimpinan rasional merupakan derivasi konstitusi yang dibangun atas dasar pemikiran rasional, semacam birokrasi. Kepemimpinan tradisional merupakan derivasi tradisi, seperti dalam kerajaan maupun monarki konstitusional. Sedangkan pada tipe kepemimpinan kharismatik, kewenangan berdasarkan kualitas tertentu dari seseorang dengan masa ia ditempatkan terpisah dan diperlakukan sebagai *person* yang mempunyai kekuatan supranatural, manusia super atau setidaknya memiliki kualitas kekuasaan yang bersifat luar biasa atau ajaib. Sejauh kharisma dapat dilihat seseorang, ia terlihat pada kemampuan untuk memproyeksikan dengan sukses suatu gambaran dirinya sebagai pemimpin yang luar biasa. Herman Sulisty, "Tranformasi Kepemimpinan Pesantren," dalam *Pesantren*, edisi No.1/Vol. III/1986, 18.

²⁴<http://ejournal.sunan-ampel.ac.id/index.php/Paramedia/article/viewFile/162/148> diakses tanggal 10 Oktober 2012.

²⁵Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara Analisis Kritis Pemikiran Politik Nur Kholis Madjid* (Jakarta: PT. Raja grafindo, 2004), hlm. 35.

Politik yang membawa nama besar seorang kiai sudah menjadi budaya begitu kental, meski sudah ada batasan bahwa kiai hanya bertugas mengurus umat dan tidak mau terlibat ke dalam politik praktis, keberadaan kharismanya masih dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Setelah menjadi pemimpin, budaya sungkem terhadap kiai tidak pernah ditinggalkan, hal ini rupanya untuk melatinkan kekuasaan, agar dukungan dari kiai tidak lepas, berapa upayapun dilakukan. Bahkan lawan politik tidak jarang yang mempengaruhi kiai untuk mengalihkan dukungannya.

Sejarah panjang tersebut memberikan pemahaman bahwa relasi antara politik dan kiai nyaris tidak terpisahkan. Beragam asumsi menilai relasi itu, ada yang mendukung namun ada pula yang mencibir atau bahkan menggugatnya. Bagaimanapun relasi antara kiai dan dunia politik dalam kehidupan politik di Indonesia tetap menjadi hal yang menarik. Hal ini juga membuktikan bahwa kiai memiliki peran yang sangat besar dalam perpolitikan di Nusantara.

Dinamika Perkembangan Pesantren

Memasuki 1970-an, pesantren mengalami perubahan signifikan, perubahan dan perkembangan itu bisa ditilik dari dua sudut pandang. *Pertama*, pesantren mengalami kuantitas luar biasa dan menakjubkan, baik di wilayah *rural* (pedesaan), *sub-urban* (pinggiran kota), maupun *urban* (perkotaan). Data Departemen Agama pada 1977 jumlah pesantren masih sekitar 4.195 buah dengan jumlah santri sekitar 677.394 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 1985 dengan jumlah 6.239 buah dan santri yang mencapai 1.084.801 orang.

Dua dasawarsa kemudian yaitu tahun 1997, Departemen Agama mencatat jumlah pesantren mengalami kenaikan mencapai 224% atau 9.388 buah, dan kenaikan jumlah santri mencapai 261% atau 1.770.768 orang. Data terakhir Departemen Agama tahun 2001 menunjukkan jumlah pesantren seluruh Indonesia mencapai 11.312 dengan santri sebanyak 2.737.805 orang. Jumlah ini meliputi pesantren salafiyah, tradisional sampai modern.

Perkembangan *kedua*, menyangkut penyelenggaraan pendidikan. Sejak 1970-an bentuk-bentuk pendidikan yang diselenggarakan di pesantren sudah sangat bervariasi. Bentuk-bentuk pendidikan diklasifikasikan menjadi 4 tipe, yakni:

- 1) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional, baik hanya memiliki sekolah keagamaan (MI, MTs, MA dan PTAI) maupun juga memiliki sekolah umum (SD, SMP, SMA dan PT umum), seperti pesantren Tebuireng Jombang dan pesantren Syafi'iyah Jakarta.
- 2) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum meski tidak menerapkan kurikulum nasional seperti pesantren Gontor Ponorogo dan Darul Rahman Jakarta.
- 3) Pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam dalam bentuk Madrasah Diniyah seperti pesantren Tegal Rejo Magelang.
- 4) Pesantren hanya menjadi tempat pengajian.

Seiring dengan perkembangan zaman, pesantren-pesantren ada yang berusaha mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu maka unsur pesantren kini bisa berkembang menjadi bermacam-macam.

Menurut Nurcholis Madjid, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang bertahan dengan konsentrasi keilmuan tradisional, saat sekarang sedang menghadapi dua pilihan dilematis. Menurut Nurcholis Madjid sebagaimana dikutip Yasmadi, pesantren harus mengambil sikap apakah akan tetap mempertahankan tradisinya, yang mungkin dapat menjaga nilai-nilai agama; ataukah mengikuti perkembangan dengan resiko kehilangan asetnya. Tetapi, sebenarnya ada jalan ketiga, hanya saja menuntut kreativitas dan kemampuan rekayasa pendidikan yang tinggi melalui pengenalan aset-asetnya atau identitasnya terlebih dahulu, kemudian melakukan pengembangan secara modern.²⁶

Sebagai lembaga pendidikan tradisional, pesantren menurut Mukti Ali mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1). Adanya hubungan yang akrab antara kiai dan santri; 2). Tradisi ketundukan dan kepatuhan seorang santri terhadap kiai; 3). Pola hidup sederhana; 4). Kemandirian atau independensi; 5). Berkembangnya iklim dan tradisi tolong menolong serta suasana persaudaraan; 6). Disiplin ketat; 7).

²⁶Yasmadi, *Modernisasi Pesantren* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 99.

Berani menderita untuk mencapai tujuan; dan 8). Kehidupan dengan tingkat religius tinggi.²⁷

Demikian juga Mastuhu, dalam disertasinya yang berjudul *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, yang menyatakan bahwa sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional, pesantren mempunyai empat ciri khusus yang menonjol, yaitu mulai dari hanya memberikan pelajaran agama versi kitab-kitab Islam klasik berbahasa Arab, mempunyai teknik pengajaran yang unik dengan metode *sorogan* dan *bandongan* atau *wetonan*.²⁸

Pola berikutnya, adanya upaya mengembangkan tradisi keilmuan di pesantren. Sejumlah upaya semisal perubahan dan penyesuaian kurikulum pesantren mulai dilakukan. Pembenahan internal pesantren dengan melakukan segala perbaikan infrastruktur dan program-program pengembangan intelektual pun mulai dilakukan. Citra pesantren sebagai lembaga pendidikan yang kumuh lambat laun bisa ditepis. Namun bukan itu saja yang penting dilakukan pesantren, lebih dari itu adalah perbaikan kualitas akademik pesantren yang seharusnya menjadi prioritas utama.

Sejalan dengan kecendungan deregulasi di bidang pendidikan, penyetaraan juga diarahkan pada pesantren. Jika pada masa Orde Baru tidak ada satupun pendidikan pesantren (terutama tipe kedua) yang mendapatkan status (sertifikasi), saat ini sudah dua pesantren yang telah mendapatkannya (disamakan dengan pendidikan umum) yaitu pesantren Gontor Ponorogo dan Pesantren Al-Amien Preduan Madura. Sedangkan tipe ketiga atau dikenal dengan "Pesantren Salafiyah" telah memperoleh penyetaraan melalui SKB dua menteri (Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Nasional) No. 1/U/KB/2000 dan No. MA/86/2000 tertanggal 30 Maret 2000. SKB ini memberikan kesempatan kepada pesantren salafiyah untuk ikut menyelenggarakan pendidikan dasar sebagai upaya mempercepat pelaksanaan wajib belajar, dengan persyaratan penambahan mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika dan IPA dalam kurikulum.

²⁷Amin Haedari, *Masa Depan Pesantren* (Jakarta: IRD Press, 2005), hlm. 15.

²⁸Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 25.

Mempertimbangkan proses perubahan yang terjadi di pesantren, tampak bahwa sampai dewasa ini lembaga telah memberikan kontribusi penting dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan, baik yang masih mempertahankan sistem pendidikan tradisionalnya maupun yang sudah mengalami perubahan, memiliki perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dari waktu ke waktu, pesantren semakin tumbuh dan berkembang kuantitas maupun kualitasnya. Dengan berbagai inovasi sistem pendidikan, sampai saat ini pendidikan pesantren tidak kehilangan karakteristik unik yang membedakan dirinya dengan model pendidikan umum yang diformulasikan dalam bentuk sekolahan.²⁹

Peran Politik Kiai terhadap Pendidikan Pesantren

Dalam kesehariannya keberadaan seorang kiai biasanya tidak bisa dilepaskan dari peranannya sebagai pengelola pengasuh lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren. Basis utama kegiatan seorang kiai dalam kesehariannya adalah mengurus santri dan pesantrennya.

Kiai oleh masyarakat sering juga disebut ulama, seperti yang telah dijelaskan di muka, karena ia sebagai penyandang amanah *waratsah al-anbiyâ'* (pewaris para nabi). Karena posisinya sebagai pewaris misi nabi, kiai merasa bertanggung jawab mentransmisikan nilai-nilai keagamaan kepada generasi berikutnya. Salah satu untuk menyebarkan misi suci itu adalah melalui pendidikan.

Dibangunnya model pendidikan pesantren yang diintrodusir kalangan kiai sudah barang tentu disesuaikan dengan tuntunan dan perkembangan masyarakat pada zamannya. Datangnya gelombang perubahan, menyebabkan masyarakat semakin terbuka terhadap berbagai informasi, berpengaruh terhadap daya kritis masyarakat untuk memilih lembaga pendidikan yang dianggap akan menguntungkan bagi masa depannya.

Dengan derasnya perubahan itu, sebagian pengamat memang mengkhawatirkan kelangsungan pesantren, karena arus perubahan itu melahirkan tuntutan masyarakat yang semakin realistis sebagai ciri masyarakat modern. Atau bisa jadi, lantaran pesantren tidak dapat

²⁹Ibid., hlm. 5-8.

menjawab tuntutan masyarakat serba pragmatis itu, kiai dan pesantrennya akan termarginalkan oleh kemajuan zaman.

Terjadinya kasus sebuah pesantren perlahan-lahan ditinggalkan oleh para santrinya, hingga pesantren itu akhirnya mati. Namun, tergesurnya pesantren itu, bukan karena tidak bisa menjawab tuntutan kemajuan masyarakat, melainkan justru karena faktor politik. Ini memang tidak pernah diprediksi oleh masyarakat sebelumnya.³⁰

Namun demikian, terdapat dua penelitian yang hasilnya mengejutkan adalah *pertama*, yang dilakukan oleh Asfar (1995). Penelitian tersebut seolah-olah menepis pandangan yang selama ini berkembang, yaitu bahwa terdapat hubungan paternalistik yang kokoh antara kiai dan santri dan karena itu pula apa yang dikehendaki oleh kiai itulah yang dijadikan hasil penelitian tersebut harus dirubah, sebab bukti lapangan sudah tidak mengatakan demikian.

Kedua, hasil penelitian Usman (1994) menyatakan bahwa tidak semua santri berafiliasi politik mengikuti kiainya. Padahal penelitian usman ini dilakukan di lingkungan tarekat, yang pada umumnya ketaatan santri pada kiai lebih kokoh. Dalam penelitian ini diperoleh data bahwa pemilihan tanda gambar para santri di pesantren Jombang hanya 5% yang mengatakan ikut pilihan kiainya. Lainnya berdasarkan pilihan orang tua 31%, tokoh yang ditampilkan 30%, penampilan organisasi peserta pemilu 18% dan program OPP 16%.³¹

Menjalankan fungsi pendidikan memang menjadi tugas pokok sebuah pesantren. Identitas pesantren adalah lembaga pendidikan, walaupun dalam perjalanannya berbagai fungsi dijalankan oleh lembaga ini. Namun demikian, peran sebagai lembaga pendidikan adalah yang utama. Bahkan Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa selama pesantren dapat menjalankan fungsi pendidikan yang relevan

³⁰Hal itu terjadi karena kiai masuk dalam salah satu partai politik, para santrinya meninggalkan pesantren tersebut, yaitu pesantren yang diasuh oleh kiai Dardak di desa Bongkah, yang tidak beraktifitas lagi sejak tahun 1970. Juga pesantren yang diasuh oleh kiai Latif di desa Suko Tebon, yang kiainya dituduh masyarakat masuk partai Golkar. Meski pesantren ini tetap bertahan, jumlah santrinya terus berkurang. Lihat Suprayogo, *Kiai dan Politik*, hlm. 207-209.

³¹Ibid., hlm. 230.

bagi kehidupan masyarakat, selama itu pula pesantren dapat menjaga keberadaan dan kelangsungan hidupnya.

Menyelenggarakan pendidikan yang relevan bagi kehidupan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari oleh pesantren kalau tidak ingin “mati kesepian”, seperti yang dialami oleh beberapa pesantren yang ada di Indonesia, juga pesantren-pesantren yang ada di Malaysia. Pesantren di negeri Jiran kini jumlahnya sekitar 40 buah.³²

Pemberian identitas pesantren hanya sebagai lembaga pendidikan menjadi semakin tidak memadai dengan kemenangan NU dalam pemilu 1955. NU sebagian besar didukung kiai dan ulama yang tampil dalam jajaran empat partai politik besar di Indonesia pada masa itu. Kenyataan ini menyadarkan banyak pihak bahwa kiai mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan politik. Kekuatan ini membuat kiai beserta peserta pesantrennya selalu menjadi sasaran “tarik menarik” antara kekuatan sosial politik hingga kini.

Keterlibatan pesantren dalam politik membawa implikasi terhadap eksistensi pesantren di satu sisi dan terhadap kekuatan politik yang didukung oleh pesantren. Bagi pesantren yang kainya terlampaui sibuk mengurus politik akan berkurang waktu dan perhatiannya dalam mengurus pesantren. Hal ini disebabkan aktivitas politik membuat para kiai harus sering keluar untuk koordinasi, rapat dan kegiatan politik lainnya. Sehingga, akan mengkhawatirkan pengelolaan pesantren yang dipimpinnya terbengkalai. Hal inilah yang harus benar-benar diperhatikan oleh kiai atau pimpinan pesantren bila mereka ingin terlibat dalam politik.

Banyak pesantren yang mengalami penurunan kualitas karena Kiai atau pimpinan pesantrennya lebih sibuk berpolitik. Pesantren yang terlampaui aktif dalam peran politiknya (*political oriented*) sangat mungkin akan ditinggalkan oleh santrinya. Sebab orang tua santri yang kritis akan lebih memilih pesantren yang lebih menjaga independensinya terhadap politik praktis. Pada titik ini, dapat disimak bahwa masyarakat yang sebelumnya sangat menghormati pesantren dan selalu mengikuti anjuran dan arahan pesantren mempunyai dasar

³²Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 122-123.

untuk menentang legitimasi fatwa pesantren, khususnya dalam isu-isu sosial dan politik, terutama dalam kasus pemilu.³³

Dalam konteks penentangan atau penolakan ini, anjuran pesantren untuk memilih sebuah partai politik tertentu juga sering membuat umat terpecah dalam politik dukung mendukung yang tidak kondusif. Perpecahan suara yang sering diiringi dengan konflik-konflik sosial, membuktikan bahwa aktivitas politik praktis yang dilakoni pesantren lebih banyak menimbulkan *mudhârat*.

Sementara itu, independensi pesantren yang selama ini menjadi kekuatan utama dalam menjaga nilai-nilai dan moralitas masyarakat akan semakin sulit ditegakkan. Bahkan banyak pesantren yang masuk dalam lingkaran kekuasaan politik, secara sadar tunduk pada keputusan-keputusan politik. Mereka harus turut menjalankan berbagai program dan kebijakan pemerintah, meskipun hal tersebut diyakini merugikan kepentingan pesantren.

Penutup

Kiai sebagai pemimpin yang karismatik sudah umum dikenali masyarakat. Pengaruh kiai yang kuat "dimanfaatkan" atau menjadi incaran para politisi untuk mendulang suara. Berbagai taktik dan strategi kampanye politik yang dijalankan partai politik biasanya tidak melupakan akan arti penting peran kiai sebagai "*vote getter*" terdepan dalam mengumpulkan suara pemilih. Apalagi, semenjak bergulirnya reformasi banyak partai mengusung azas Islam sebagai *platform* dan landasan ideologis partai. Hal ini tampak sejalan dengan aktivitas kiai yang menyebar luaskan ajaran Islam. Tentu tidak dapat dihindari terjadi "pemanfaatan" kepemimpinan kiai di pesantren oleh para politisi baik yang mengusung asas Islam maupun nasionalis.

Perkembangan politik praktis di Indonesia membawa sejumlah kiai terjun langsung maupun tidak langsung dalam kancah perpolitikan di Tanah Air. Aspirasi politik kiai dimanfaatkan partai politik di tingkat nasional maupun lokal dalam setiap Pemilu. Dengan

³³Saidin Ernas, "Bias Politik Pesantren dari Pragmatisme Transaksional hingga Resistensi Sosial", dalam <http://jksg.umy.ac.id>, volume 2 nomor 1 Februari 2011 (22 September 2012), hlm. 20.

demikian, kiai dihadapkan pada dunia politik praktis yang sarat dengan ketidakpastian dan kepentingan.

Keterlibatan pesantren dalam politik membawa implikasi terhadap eksistensi pesantren di satu sisi dan terhadap kekuatan politik yang didukung oleh pesantren. Bagi pesantren yang kiainya terlampaui sibuk mengurus politik akan berkurang waktu dan perhatiannya dalam mengurus pesantren. Hal ini disebabkan aktivitas politik membuat para kiai harus sering keluar untuk koordinasi, rapat dan kegiatan politik lainnya. Sehingga, akan mengkhawatirkan pengelolaan pesantren yang dipimpinnya terbengkalai. Hal inilah yang harus benar-benar diperhatikan oleh kiai atau pimpinan pesantren bila mereka ingin terlibat dalam politik.

Banyak pesantren yang mengalami penurunan kualitas karena Kiai atau pimpinan pesantrennya lebih sibuk berpolitik. Pesantren yang terlampaui aktif dalam peran politiknya (*political oriented*) sangat mungkin akan ditinggal oleh santrinya. Sebab orang tua santri yang kritis akan lebih memilih pesantren yang lebih menjaga independensinya terhadap politik praktis. Pada titik ini, dapat disimak bahwa masyarakat yang sebelumnya sangat menghormati pesantren dan selalu mengikuti anjuran dan arahan pesantren mempunyai dasar untuk menentang legitimasi fatwa pesantren, khususnya dalam isu-isu sosial dan politik, terutama dalam kasus pemilu. *Wa Allâh a'lam bi al-Shawâb.**

Daftar Pustaka

- Andrain, Carless F. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Apter, David E. *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Attas, Naquib. *Islam dan Sekularisme*. Bandung: Pustaka Salman, 1981.
- Bolland, BJ. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1982.
- Dirdjosanjoto, Pradjarta. *Memelihara Umat Kiai Pesantren-Kiai Langgar*. Jakarta: LKIS, 1994.

- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Ernas, Saidin. "Bias Politik Pesantren dari Pragmatisme Transaksional hingga Resistensi Sosial", dalam <http://jkskg.ums.ac.id>, volume 2 nomor 1 Februari 2011. (22 September 2012).
- Haedari, Amin. *Masa Depan Pesantren*. Jakarta: IRD Press, 2005.
- Hallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyâsah al-Syarî'ah*. Kairo: Daral Ansar, 1997.
- Horikoshi, Hiroko. *Kiai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M, 1987.
- <http://ejournal.sunan-ampel.ac.id/index.php/Paramedia/article/viewFile/162/148> diakses tanggal 10 Oktober 2012.
- Jailani, Abdul Qadir. *Peran Ulama dan Santri dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1994.
- Kamaruddin, *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi: Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu 2004*. Jakarta: Visi Publishing, 2002.
- Littlejohn, Stephen W. *Theories of Human Communication*, Belmont. California: Wadsworth Publishing Company, 1992.
- Madjid, Nurcholis. *Bilik-bilik Pesantren*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, 1994.
- Patoni, Ahmad. *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyâsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Purwoko, Bambang. "Perilaku Politik Elit Agama dalam Dinamika Politik Lokal", dalam *Focus Groups Discussion*, "Perilaku Elit Politik dan Elit Agama dalam Pilkada di Kabupaten Kulonprogo", diselenggarakan oleh LABDA Shalahuddin, JPPR, dan The Asia Foundation, Yogyakarta, 3 Agustus 2006.
- Sulistyo, Herman. Transformasi Kepemimpinan Pesantren, dalam *Pesantren*, edisi No.1/Vol. III/1986, 18.
- Syafiie, Rolan. *Agama dan Politik*. Bandung: Pustaka Politika, 2003.

- Syamsuddin, Dien. "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Islam", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an* No. 2, Vol. IV, 1993.
- Tahqiq, Nanang. *Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Yasmadi. *Modernisasi Pesantren*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Zamharir, Muhammad Hari. *Agama dan Negara Analisis Kritis Pemikiran Politik Nur Kholis Madjid*. Jakarta: PT. Raja grafindo, 2004.